



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 48 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023- 2027

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4)
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023 - 2027.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
RAD-SPM

Pasal 8

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi dan permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
 - c. BAB III : Strategi, Pemenuhan Penerapan SPM
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR ...48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya sehingga Peraturan Bupati Bengkayang tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN DAN SASARAN	2
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH	2
1.4. DASAR HUKUM PENERAPAN SPM.....	8
1.5. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM.....	9
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	11
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	11
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	28
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	37
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....	37
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM.....	45
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.....	98
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	98
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1. KESIMPULAN	105
5.2. SARAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	11
Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	17
Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	18
Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	21
Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	22
Tabel 2.7 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	26
Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Bengkayang 2023-2027.....	45
Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Bengkayang 2023-2027.....	49
Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bengkayang 2023-2027	62
Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Bengkayang 2023-2027	67
Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang 2023-2027.....	72
Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Bengkayang 2023-2027.....	82
Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, Pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak di peroleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanis mepenerapan SPM.

SPM di posisikan untuk menjawab isu-isukrusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjagakelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan public secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkayang

menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan kantujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mencapai sasaran meningkatnyaak sebilas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan system manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang Penyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

1.3. Kondisi Umum Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bengkayang berada pada posisi 108,39⁰⁰” Bujur Timur sampai 110⁰10’00” Bujur Timur dan antara 0,33⁰’00” Lintang

Utara sampai 1°30'00" Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur).
- 2) Sebelah selatan dengan Kabupaten Mempawah
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.
- 4) Sebelah Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Laut Natuna.

Dengan letak geografis sebagaimana di atas Kabupaten Bengkayang mempunyai panjang garis pantai sepanjang 36,5 Km, dan panjang garis perbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) 89,5 Km, dan memiliki 12 (dua belas) buah pulau, yang diantaranya 6 buah pulau belum berpenghuni.

TABEL 1.1
BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN BENGKAYANG

Batas Administrasi <i>Administration Border</i>	Berbatasan dengan <i>Border On</i>
(1)	(2)
Sebelah Utara	Kabupaten Sambas Serawak (Malaysia Timur)
Sebelah Selatan	Kabupaten Mempawah
Sebelah Timur	Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau
Sebelah Barat	Kota Singkawang Laut Natuna

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

TABEL 1.2
BATAS ADMINISTRASI DAN PANJANG PERBATASAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Batas Administrasi <i>Administration Border</i>	Panjang Perbatasan <i>Border Length</i> (Km)
(1)	(2)
Kabupaten Sambas	126
Kabupaten Landak	168
Kabupaten Mempawah	54
Kabupaten Sanggau	31
Kota Singkawang	59

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

**BATAS-BATAS WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Kecamatan District	Utara North	Timur East	Selatan South	Barat West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sungai Raya	S Raya Kep.	Capkala	Kab. Mempawah	Laut Natuna
2. Capkala	S. Raya Kep.	Monterado	Kab. Mempawah	Sungai Raya
3. Sungai Raya Kepulauan	Kota Singkawang	Monterado	Sungai Raya	Laut Natuna
4. Samalantan	Lembah Bawang	Sungai Betung	Kab. Landak	Monterado
5. Monterado	Kota Singkawang	Samalantan & Lembah Bawang	Kab. Mempawah	Capkala
6. Lembah Bawang	Kab. Sambas	Lumar	Samalantan	Monterado
7. Bengkayang	Lumar	Teriak	Kab. Landak	Sungai Betung
8. Teriak	Suti Semarang	Kab. Landak	Kab. Landak	Bengkayang
9. Sungai Betung	Lumar	Bengkayang	Kab. Landak	Samalantan
10. Ledo	Kab. Sambas	Sanggau Ledo	Suti Semarang	Lumar
11. Suti Semarang	Tujuh Belas	Kab. Landak	Teriak	Ledo
12. Lumar	Kab. Sambas	Ledo	Bengkayang	Lembah Bawang
13. Sanggau Ledo	Kab. Sambas	Seluas & Tujuh Belas	Ledo	Kab. Sambas
14. Tujuh Belas	Seluas	Kab. Landak	Suti Semarang	Sanggau Ledo
15. Seluas	Jagoi Babang	Siding	Tujuh Belas	Kab. Sambas
16. Jagoi Babang	Serawak	Siding	Seluas	Kab. Sambas
17. Siding	Serawak	Kab. Sanggau	Kab. Landak	Seluas

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 Km² atau sekitar 3,68 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, memiliki topografi

sangat bervariasi sebagian tanah datar, sebagian bergelombang namun ada beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Jenis tanah yang dimiliki mempunyai sifat dan ciri jenis Organosol, Alluvial, Padsolid Merah Kuning, Podsol dan Latosol.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

TABEL 1.6
PERSENTASE LUAS KABUPATEN BENGKAYANG
MENURUT KECAMATAN

Kecamatan <i>District</i>	Luas Area (Km ²)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	75,85	1,41
2. Capkala	46,35	0,86
3. Sungai Raya Kepulauan	394,00	7,30
4. Samalantan	420,50	7,79
5. Monterado	291,00	5,39
6. Lembah Bawang	188,00	3,48
7. Bengkayang	167,04	3,10
8. Teriak	231,51	4,29
9. Sungai Betung	205,95	3,82
10. Ledo	481,75	8,93
11. Suti Semarang	280,84	5,20
12. Lumar	275,21	5,10
13. Sanggau Ledo	392,50	7,27
14. Tujuh Belas	221,00	4,10
15. Seluas	506,50	9,39
16. Jagoi Babang	655,00	12,14

Kecamatan <i>District</i>	Luas Area (Km ²)	Persentase Percentage (%)
17. Siding	563,30	10,44
Jumlah/ Total	5 396,30	100,00

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

TABEL 1.7
JARAK IBU KOTA KECAMATAN KE IBUKOTA
KABUPATEN BENGKAYANG

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	Sungai Duri	89,56
2. Capkala	Capkala	72,32
3. Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	72,56
4. Samalantan	Samalantan	37,39
5. Monterado	Monterado	53,18
6. Lembah Bawang	Papan Uduk	57,39
7. Bengkayang	Bengkayang	0
8. Teriak	Bana	13,76
9. Sungai Betung	Suka Maju	14,84
10. Ledo	Ledo	31,01
11. Suti Semarang	Suti Semarang	67,03
12. Lumar	Lumar	16,94
13. Sanggau Ledo	Lembang	49,60
14. Tujuh Belas	Pisak	61,60
15. Seluas	Seluas	76,08
16. Jagoi Babang	Jagoi	89,96
17. Siding	Siding	103,68

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

❖ Topografis

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Bengkayang adalah jenis tanah podsolik merah kuning, yaitu sebesar 3.223,47 kilometer persegi dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 67 kilometer persegi.

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40 % dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 %. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 3.430,23 kilometer persegi. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar 360,20 kilometer persegi dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 5.036,10 kilometer persegi.

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.

❖ Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang dari sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang semester 2 (dua) tahun 2022 mencapai 290.588 jiwa yang terdiri dari laki-laki 150.920 dan perempuan 139.668.

Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Monterado sebanyak 34.189 Jiwa (11,77%) sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Suti Semarang sebanyak 6.226 jiwa (2,14).

1.4. Dasar Hukum Penerapan SPM

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
9. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

1.5. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus di hadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyusun strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Bengkayang yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat Inisiasi yang berisisolusi dan Inovasi yang dapat di terapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus di pedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Kabupaten maupun Kabupaten/Kota.

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB II

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bengkulu 2021-2026 terdapat beberapa focus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bengkulu

Tabel 2.2 Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	3,000,000	3,000,000	100%
2			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0%
3			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	100,000,000	100,000,000	100%
4			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0	0%
5			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
6			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	100%	149,370,000	149,370,000	100%		
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	100%	52,382,000	52,382,000	100%		
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	100%	49,370,000	49,370,000	100%		
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	97,64%	42,356,000	41,356,000	97,64%		
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	99,31%	425,389,500	422,458,500	99,31%		
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	81,43%	3,320,267	2,703,600	81,43%
					2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	94,35%	2,624,583	2,476,400	94,35%
					3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0%	0	0	0%
					4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	98,26%	987,050,991	969,832,128	98,26%
					5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0%	0	0	0%
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah			Kegiatan	0%	0	0	0%		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Pemenuhankualitaspendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidika nanak usia dini	Pengawas sekolah atau penilik	81,43%	3,320,267	2,703,600	81,43%
			1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	60,76%	48,929,200	29,727,100	60,76%
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensipendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0%	0	0	0%
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0%	0	0	0%
2	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampaidengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0%	0	0	0%
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0%	2,100,000	0	0%
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0%	0	0	0%
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0%	4,750,000	0	0%
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukankomunitasbelajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0%	0	0	0%
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	100%	283,401,000	283,401,000	100%
			1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan	Kegiatan	0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		(SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan					
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0%	0	0	0%
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0%	417,000,000	0	0%
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk penting nyainklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasiter hadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunajaran	Kegiatan	0%	0	0	0%
		Pemenuhan jumlahpen didik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	81,43%	0	2,703,600	81,43%
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	94,35%	2,624,583	2,476,400	94,35%
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	1,57%	133,038,000	2,090,000	1,57%
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	96,00%	5.665,179,467	5,438,509,692	96,00%
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepalas ekolah	Kegiatan	0%	0	0	0%
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0%	0	0	0%
			7	Pemetaan kecuku panjumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	81,43%	3,320,267	2,703,600	81,43%
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum	Kegiatan	0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan					
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0%	0	0	0%
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0%	0	0	0%
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampaidengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0%	0	0	0%
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0%	0	0	0%
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan dayatampung	Peserta didik	0%	0	0	0%
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0%	0	0	0%
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0%	0	0	0%
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	99.35 %	283,401,000	281,551,000	99.35 %
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0%	0	0	0%
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0%	0	0	0%
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0%	0	0	0%
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah	Kegiatan	0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			diskriminasi terhadap pekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran						
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	81.43 %	3,320,267	2,703,600	81.43 %
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	94.35 %	2,624,583	2,476,400	94.35 %
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0%	0	0	0%
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0%	0	0	0%
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	81.43 %	1,660,133	1,351,800	81.43 %
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0%	0	0	0%
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas Sekolah	81.43 %	3,320,267	2,703,600	81.43 %
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0%	0	0	0%
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0%	0	0	0%
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0%	0	0	0%

Sumber: Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	98,30%	768,880,000	755,830,000	98,30%
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	73,80%	938,434,600	692,573,350	73,80%
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	92,07%	423,129,455	389,555,000	92,07%
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	99,49%	2,111,528	2,100,776	99,49%
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	99,33%	861,868,450	856,120,000	99,33%
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	97,65%	852,722,000	832,668,750	97,65%
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	97,03%	694,488,644	673,851,444	97,03%
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	100%	403,572,000	403,568,750	100%
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	100%	317,722,000	317,718,750	100%
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	90,79%	421,132,000	382,328,750	90,79%
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	98,25%	456,320,000	448,320,000	98,25%
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	95,91%	250,640,000	239,390,000	95,91%
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0%	0	0	0%
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi sibencana	Dokumen	0%	0	0	0%

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	98.58 %	645,022,500	635,861,000	98.58 %
			2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0%	0	0	0%
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	95.30 %	1,564,800,000	1,491,281,000	95.30 %
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan	SR	95,31%	5,889,625,000	5,613,290,500	95,31%
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0%	0	0	0%
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan	Liter/Detik	0%	0	0	0%
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0%	0	0	0%
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0%	0	0	0%
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Orang	0%	0	0	0%
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0%	0	0	0%
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0%	0	0	0%
			12	Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM	Unit	0%	0	0	0%
			13	Pembinaan dan pengawasann terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM	Unit	0%	0	0	0%
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0%	0	0	0%
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasanPerdesaan	Unit	0%	0	0	0%
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	RumahTangga	0%	0	0	0%
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan	Unit	0%	0	0	0%
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan		0%	0	0	0%
			20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerkotaan	Unit	0%	0	0	0%
			21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0%	0	0	0%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan PengembanganS istem Air Limbah Domestik dalam Daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			3	Pembangunan/penyediaanSistemPengelolaa n Air Limbahterpusatskala Kota	Rumah Tangga	0%	0	0	0%
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0%	0	0	0%
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0%	0	0	0%
			6	Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat	RumahTangga	0%	0	0	0%
			7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0%	0	0	0%
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SistemPengelolaan Air LimbahDomestik		0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0%	0	0	0%
			10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0%	0	0	0%
			11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0%	0	0	0%
			12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0%	0	0	0%
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0%	0	0	0%
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0%	0	0	0%
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0%	0	0	0%
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0%	0	0	0%
			17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0%	0	0	0%

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkulu Tahun 2022

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	99,00 %	6,490,600	6,425,600	99,00 %
			2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	99,53%	33,571,025	33,412,424	99,53%
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0%	0	0	0%
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0%	0	0	0%
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	99,80%	14,659,750	14,629,750	99,80%
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	82,26%	8,497,200	6,990,000	82,26%
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	99,31 %	73,229,150	72,726,550	99,31 %
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0%	0	0	0%
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0%	0	0	0%
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0%	0	0	0%
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0%	0	0	0%

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAI AN (%)	PAGU	REALI SASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalu ideteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0%	50,000,000	0	0%
			2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0%	35,998,000	0	0%
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	30,000,000	0	0%
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0%	30,000,000	0	0%
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0%	30,000,000	0	0%
			6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0%	50,000,000	0	0%
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0%	0	0	0%
			8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0%	0	0	0%
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampa kpenegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0%	0	0	0%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0%	39,995,000	0	0%
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0%	30,000,000	0	0%
			3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0%	2,652,163,569	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAI AN (%)	PAGU	REALI SASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	0%	43,316,000	0	0%
2	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen				
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenisbencana)	Orang	82.23 %	42,260,000	34,748,400	82.23 %
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0%	0	0	0%
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiap siagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Unit	0%	0	0	0%
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiap siagaan	Dokumen	0%	0	0	0%
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiap siagaan bencana	Kawasan	0%	0	0	0%
			7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0%	0	0	0%
			8	Pengembangan kapasitas Tim ReaksiCepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	52.79 %	88,000,000	46,457,300	52.79 %
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0%	0	0	0%
			10	Gladi kesiap siagaan terhadap bencana	Orang	0%	0	0	0%
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0%	0	0	0%
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0%	0	0	0%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	0%	0	0	0%
			2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0%	0	0	0%
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	0%	0	0	0%
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0%	0	0	0%
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan DaruratBencana	Laporan	0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAI AN (%)	PAGU	REALI SASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			6	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemii/Wabah Penyakit	Laporan	5.50 %	32,699,800	1,800,000	5.50 %
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	31,440,000		0%
			3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	79,952,500		0%
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0%	25,900,000	12,242,500	0%
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0%	0	0	0%
			6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		158,462,950	10,760,000	6,79%
3	Program Pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bah an Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	31.37 %	50,403,500	15,810,000	31.37 %
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	20.39 %	44,521,000	9,080,000	20.39 %
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0%	0	0	0%
			5	Standa risasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0%	0	0	0%
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0%	44,397,000	0	0%
			7	Pembinaana paratur pemadam kebakaran	Dokumen				
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			9	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0%	0	0	0%
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0%	0	0	0%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0%	0	0	0%
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0%	0	0	0%
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0%	0	0	0%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0%	0	0	0%
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0%	0	0	0%
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0%	0	0	0%
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0%	0	0	0%
			1	Standar isasisarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0%	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			2	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayaka nmanusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0%	0	0	0%
			3	Pembinaan aparaturn pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayaka nmanusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0%	0	0	0%

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.7 Kondisi capaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan permakanaan	Orang	98,47%	22,962,400	22,540,500	98,47%
			2	Penyediaan sandang	Orang	97,47%	22,500,000	21,929,900	97,47%
			3	Penyediaan ala tbantu	Orang	99,00%	30,000,000	29,698,950	99,00%
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	99,17%	10,840,000	10,749,800	99,17%
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0%	0	0	0%
			6	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusiater lantar, sertage landangan pengemis dan masyarakat	Orang	0%	0	0	0%
			7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0%	0	0	0%
			8	Pemberi anak seske layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0%	0	0	0%
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0%	0	0	0%
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	95,21%	28,381,000	27,021,550	95,21%
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	99,96%	12,037,600	12,032,300	99,96%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0%	0	0	0%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan makanan	Orang	99,99%	34,807,000	34,804,500	99,99%
			2	Penyediaan sandang	Orang	99,98%	13,131,750	13,129,450	99,98%
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	87,65%	9,720,000	8,520,000	87,65%
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	100%	60,813,000	60,812,329	100%
			5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0%	0	0	0%

Sumber: Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bengkayang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

- Adanya pergantian personil yang menangani pendataan
- Kurang validnya data yang tersedia
- Data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan penerapan SPM

2. Penghitungan Kebutuhan

Bahwa ada beberapa penghitungan kebutuhan yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan

3. Perencanaan dan Penganggaran

Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan program SPM

4. Pelaksanaan

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penerapan SPM pada urusan Pendidikan.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan	Permasalahan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Kurangnya informasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga b. Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan masyarakat serta belum memahami sepenuhnya mengenai

		<p>bahaya-bahaya pada masa kehamilan sehingga ibu hamil menganggap tidak perlu datang ke fasyankes untuk melakukan pemeriksaan apabila tidak ada keluhan dalam kehamilan</p> <p>c. Puskesmas dan desa belum optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yaitu kurang tenaga bidan yang tinggal di desa dan poskesdes</p> <p>d. Jarak tempuh Fasyankes yang jauh dari tempat tinggal ibu hamil</p> <p>e. Kerjasama Lintas Sektor antara Puskesmas dengan pihak terkait belum optimal terjadi antar puskesmas di wilayah kerjanya.</p>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p>a. Pustu dan Poskesdes tidak memenuhi standar persalinan fasyankes.</p> <p>b. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang optimal dalam mempromosikan persalinan lebih aman di fasyankes.</p> <p>c. Pertolongan persalinan masih banyak di tolong oleh dukun bayi di rumah dan tidak ada kunjungan oleh tenaga kesehatan.</p> <p>d. Letak geografis yang sulit</p>
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<p>a. Kerja sama lintas sektor yang masih kurang optimal, kurangnya dukungan desa dalam memotivasi ibu dan keluarga agar membawa anaknya untuk kunjungan neonatus sampai selesai.</p> <p>b. Letak geografis yang sulit</p>

4	Pelayanan Kesehatan Balita	<p>a. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga dalam pemenuhan hak anak balita yang harus di terimanya sehingga tidak lagi datang keposyandu untuk di timbang dan lainnya.</p> <p>b. Kurangnya kemampuan pengelola program dalam memahami indikator dalam pencapaian kunjungan balita.</p> <p>c. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang optimal.</p> <p>d. Letak geografis yang sulit</p>
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<p>a. Penyampaian Laporan belum tertib / tepat waktu</p> <p>b. Beberapa Petugas Puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan.</p> <p>c. Pergantian Pengelola Program di Puskesmas setiap tahun.</p> <p>d. Beberapa Pengelola Program Kesehatan Usia Sekolah Dasar di Puskesmas masih belum mendapatkan pelatihan Upaya Kesehatan Sekolah</p> <p>e. Kerjasama Lintas Sektor masih belum berjalan maksimal dalam pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dasar</p> <p>f. Belum seluruh sekolah melaksanakan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sesuai standar.</p> <p>g. Keterbatasan tenaga kesehatan dan anggaran dalam pelaksanaan penjangkaran usia Pendidikan Dasar.</p>

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Kader posbindu PTM belum semua terlatih; b. Belum semua desa mempunyai posbindu PTM; c. Masyarakat kurang berminat memeriksakan diri ke Posbindu karena di Posbindu tidak ada pengobatan; d. Masyarakat belum sadar pentingnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular; e. Pemerintah desa belum optimal mendukung kegiatan posbindu; f. Belum adanya Inovasi pada kegiatan Posbindu PTM untuk menarik minat Masyarakat khususnya Usia Produktif g. Ada beberapa pengelola program setiap tahun berganti.
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Laporan belum tertib / tepat waktu b. Beberapa Petugas Puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan. c. Pergantian Pengelola Program di Puskesmas setiap Tahun berubah. d. Beberapa Pengelola Program Kesehatan Lansia di Puskesmas masih belum mendapatkan pelatihan Kesehatan Lansia e. Kerjasama Lintas Sektor masih belum berjalan maksimal dalam pelayanan Kesehatan Lansia f. Belum tercovernya Posyandu Lansia di setiap desa

		g. Kader Posyandu Lansia belum terlatih
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<p>a. Penderita hipertensi tidak rutin datang ke Puskesmas untuk mengambil obat</p> <p>b. Kesadaran penderita hipertensi untuk datang ke Puskesmas masih rendah</p> <p>c. Keterbatasan petugas untuk melakukan kunjungan rumah kepada penderita hipertensi</p>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	<p>a. Penderita Diabetes Melitus (DM) tidak rutin datang ke Puskesmas untuk mengambil obat.</p> <p>b. Kesadaran penderita Diabetes Melitus (DM) untuk datang ke Puskesmas masih rendah.</p> <p>c. Keterbatasan petugas untuk melakukan kunjungan rumah.</p>
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	<p>a. Penyampaian laporan belum tertib dan tepat waktu.</p> <p>b. Beberapa petugas puskesmas kurang memahami definisi operasional dalam pencatatan dan pelaporan.</p> <p>c. Pergantian pengelola program Kesehatan jiwa di puskesmas setiap tahun.</p> <p>d. Pengelola program dan petugas pelaksana Kesehatan Jiwa di puskesmas belum semua mendapatkan pelatihan Kesehatan Jiwa.</p>

		e. Kerjasama lintas sektor masih belum berjalan maksimal dalam penanganan kasus ODGJ.
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis (TB)	<p>a. Masih banyak pengelola program belum mengentry data di Aplikasi Online SITB.</p> <p>b. Pengelola program setiap tahunnya selalu berganti-ganti.</p> <p>c. Kurangnya kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan pelacakan orang terduga Tuberkolosis (TB).</p> <p>d. Belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor dalam pelaporan dan pencatatan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis (TB).</p> <p>e. Belum adanya ruangan isolasi/pelayanan khusus untuk penderita Penyakit Menular.</p>
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	<p>a. Masih banyak pengelola program belum mengentry di aplikasi SIHA 2.1</p> <p>b. Pengelola program setiap tahunnya selalu berganti-ganti.</p> <p>c. Belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor dalam pelaporan dan pencatatan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.</p> <p>d. Belum adanya ruangan isolasi/pelayanan khusus untuk penderita Penyakit Menular.</p>

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Bengkayang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut, Adapun permasalahan dalam penerapan SPM Pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

2. Pengumpulan Data

- Beberapa Kecamatan tidak memiliki sumber air baku yang layak
- Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2017 sudah tidak relevan terhadap kondisi yang berkembang dan revisi SSK dalam proses

3. Penghitungan Kebutuhan

Sumber air baku yang ada cukup jauh dari permukiman sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk penyediaan SPAM

4. Perencanaan dan Penganggaran

Keterbatasan Pembiayaan dalam pengelolaan air bersih

5. Pelaksanaan

Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi sektor sanitasi terutama sub sektor air limbah di tingkat individu dan masyarakat.

6. Lain lain

- Belum dimilikinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Bengkayang menyulitkan masyarakat yang hendak membuang lumpur hasil pengurasan septi tank
- Belum adanya regulasi atau Perda Air Limbah Domestik skala Kabupaten
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman
- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Bengkayang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Keterbatasan anggaran untuk mengumpulkan data se-kabupaten Bengkayang

2. Penghitungan Kebutuhan

Belum terkumpulnya data secara menyeluruh dan tingkat keakuratan data sehingga menyulitkan untuk menghitung kebutuhan

3. Perencanaan dan Penganggaran

Masih terbatasnya koordinasi antar pemangku kebijakan dalam hal perencanaan dan penganggaran SPM Bidang Perumahan

4. Pelaksanaan

Terbatasnya anggaran dan personil bidang perumahan

5. Lain lain

Perlu penguatan koordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran

2.2.5. **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Bengkayang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

A. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Permasalahan

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- Terbatasnya anggota yang bersertifikat PPNS
- Wilayah Patroli yang luas dengan kondisi jalan yang kurang memadai
- Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
- Kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perda dan perkada
- Kurangnya dukungan operasional penegakan Perda
- Kurangnya anggaran untuk meunjang berbagai program dan kegiatan di Satpol PP.
- Belum optimalnya kerjasama antar pemangku kepentingan dan lintas sektoral dalam rangka penegakan Perda/Perkada.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Permasalahan

- Dalam melaksanakan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu mengalami hambatan-hambatan dilapangan, faktor utamanya adalah keterbatasan anggaran dan personil
- Pelaksanaan anggaran TAPD pada bidang-bidang tidak dapat dilaksanakan

- Masih minimnya sarana dan prasarana fasilitas komunikasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, baik secara personil maupun sumber daya manusia.
- Letak Geografis Kabupaten Bengkayang terdapat daerah perbukitan dan lembah, sehingga hal tersebut merupakan factor utama hambatan-hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal dan jangkauan sangat terbatas sehingga untuk mencapai target sasaran menjadi terkendala

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan dalam penerapan SPM Pada Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
Desa/Kelurahan belum menyampaikan data PMKS sebagaimana surat yang disampaikan oleh DSP3A Kab. Bengkayang
- b. Penghitungan Kebutuhan
Terbatasnya data menyebabkan penghitungan kebutuhan belum maksimal
- c. Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran yang tersedia bersifat gelondongan dan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan PMKS karena harus menyiapkan alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya pada bidang perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
- d. Pelaksanaan
Anggaran yang terbatas diprioritaskan untuk pengalokasian anggaran bagi lansia terlantar, disabilitas terlantar dan orang/anak terlantar yang merupakan warga bengkayang dan sifatnya urgent dan mendesak, sedangkan untuk gelandangan dan pengemis belum dapat dipenuhi
- e. Lain- lain
Tid

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- b. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.
- c. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- d. Peningkatan Rerata kemampuan Literasi SD dan SMP berdasarkan Asesmen Nasional ;

- e. Peningkatan Rerata kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan asesmen nasional;
- f. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B;
- g. Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1;
- h. Peningkatan Indeks Iklim Keamanan SD dan SMP ;
- i. Peningkatan Indeks Iklim Kebinekaan SD dan SMP;
- j. Peningkatan Indeks Inklusivitas SD dan SMP
- k. Peningkatan Pemenuhan Standar sarana dan prasarana pada satuan pendidikan PAUD, PNF, SD, SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan kapasitas kader;
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
- f. Melakukan koordinasi mengenai SPM urusan Kesehatan dengan melibatkan Puskesmas, Klinik Pratama, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
- g. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi;
- h. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;

- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS;
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada pemeriksaan penyakit tidak menular;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia;
- h. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di utamakan pada peningkatan Posbindu PTM;
- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
- j. Pengelolaan pelayanan kesehatan ODGJ dapat diutamakan pada peningkatan kunjungan rumah;
- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis (TB) dapat diutamakan pada pelacakan kasus penyakit menular;
- l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV dapat diutamakan dengan pelacakan kasus penyakit menular.

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu stategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan

Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan data base air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencarierial ternatifter baik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Bengkayang berpotensi terkena bencana alam, yaitu Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- c. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Kabupaten dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;

- b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan di fokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
 - 1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - 2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas

- 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
 - 3) Menyelenggarakan Sistem Operasi Siaga 24 Jam (SOS 24)
- c. Penegakan peraturan perundangan:
- 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
 - 2) Menegakkan produk hukum daerah
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Bengkayang adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 17 kecamatan di Kabupaten Bengkayang masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk di 17 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebar luasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam

memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakara nadalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bias dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Bengkayang adalah masih tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masih tingginya angka anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta meningkatnya angka penduduk miskin sebagai dampak pasca COVID-19, kurangnya pemberdayaan PPKS, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terbatasnya jumlah aparatur dinas sosial dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan rehabilitasi sosial, belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti sosial serta belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban yang terdampak bencana. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang profesional;
- b. Menjalinkan Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkayang agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan;
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders terkait untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS;
- e. Pencatatan dan pengelolaan data PPKS secara menyeluruh dan terpadu.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Sosial adalah:

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Bengkayang guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis;
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Bengkayang;
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial;
- d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur;
- e. kualitas data dan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran;
- g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial.

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
1)	Pendidikan Dasar Usia Dini			15280	3942							15280	3942						
1	Angka partisipasi sekolah	%	2022			64,20	64,20	936.116.982		APBD	DISDIKBUD			100	100	1.029.728.680		APBD	DISDIKBUD
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	2022			29,08	29,08	2.033.095.200		APBD	DISDIKBUD			29,14	29,14	2.236.404.720		APBD	DISDIKBUD
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	2022			75,34	75,34	56.961.000		APBD	DISDIKBUD			76,44	76,44	62.657.100		APBD	DISDIKBUD
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2022			2	2	-		APBD	DISDIKBUD			5	5	45.758.900		APBD	DISDIKBUD
5	Kecukupan formasi guru ASN	%	2022			51	51	-		APBD	DISDIKBUD			71	71	45.890.750		APBD	DISDIKBUD
6	Indeks distribusi guru	%	2022			57	57	23.935.850		APBD	DISDIKBUD			77	77	26.329.435		APBD	DISDIKBUD
7	Proporsi PTK bersertifikat	%	2022			51	51	-		APBD	DISDIKBUD			71	71	55.320.000		APBD	DISDIKBUD
8	Proporsi PTK penggerak	%	2022			51	51	28.364.250		APBD	DISDIKBUD			71	71	31.200.675		APBD	DISDIKBUD
9	Pengalaman pelatihan guru	%	2022			51	51	-		APBD	DISDIKBUD			71	71	65.750.000		APBD	DISDIKBUD
2)	Pendidikan Dasar SD	%		33272	32493					APBD		33272	32493						
1	Angka partisipasi kasar	%	2022			99,75	99,75	-		APBD	DISDIKBUD			100	100	50.754.000		APBD	DISDIKBUD
2	Angka partisipasi sekolah	%	2022			99,20	99,20	694.317.600		APBD	DISDIKBUD			100	100	763.749.360		APBD	DISDIKBUD
3	Angka partisipasi murni	%	2022			96,75	96,75	0		APBD	DISDIKBUD			100	100	125.750.000		APBD	DISDIKBUD
4	Kemampuan literasi	Nilai	2022			39,66	39,66	0		APBD	DISDIKBUD			47,67	47,67	135.653.000		APBD	DISDIKBUD
5	Kemampuan numerasi	Nilai	2022			29,09	29,09	0		APBD	DISDIKBUD			35,90	35,90	145.750.000		APBD	DISDIKBUD
6	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2022			-	-	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	150.450.000		APBD	DISDIKBUD
7	Perbedaan Skor numerasi	Nilai	2022			-	-	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	45.750.000		APBD	DISDIKBUD
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022			63,52	63,52	7.780.000		APBD	DISDIKBUD			84,81	84,81	23.340.000		APBD	DISDIKBUD
9	Indeks iklim kebinekaan	%	2022			66,54	66,54	7.780.000		APBD	DISDIKBUD			83,10	83,10	8.558.000		APBD	DISDIKBUD
10	Indeks iklim inklusivitas	%	2022			52,90	52,90	7.780.000		APBD	DISDIKBUD			73,57	73,57	8.558.000		APBD	DISDIKBUD
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	2022			19,00	19,00	1.944.136.556		APBD	DISDIKBUD			119	119	2.138.550.212		APBD	DISDIKBUD
12	Indeks distribusi guru	%	2022			0,37	0,37	23.935.850		APBD	DISDIKBUD			100	100	26.329.435		APBD	DISDIKBUD
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	2022			81,6	81,6	101.156.000		APBD	DISDIKBUD			163	182	111.271.600		APBD	DISDIKBUD
14	Proporsi PTK penggerak	%	2022			0	0	28.364.250		APBD	DISDIKBUD			100	100	31.200.675		APBD	DISDIKBUD
15	Pengalaman pelatihan guru	%	2022			40,20	40,20	0		APBD	DISDIKBUD			140	140	76.550.000		APBD	DISDIKBUD
3)	Pendidikan Dasar SMP			16234	13944					APBD		16234	13944						
1	Angka partisipasi kasar	%	2022			94,52	94,52	-		APBD	DISDIKBUD			100	100	80.755.000		APBD	DISDIKBUD
2	Angka partisipasi sekolah	%	2022			96,17	96,17	1.417.720.402		APBD	DISDIKBUD			100	100	1.559.492.442		APBD	DISDIKBUD
3	Angka partisipasi murni	%	2022			62,80	62,80	-		APBD	DISDIKBUD			94,20	94,20	750.575.000		APBD	DISDIKBUD
4	Kemampuan literasi	Nilai	2022			47,03	47,03	-		APBD	DISDIKBUD			62,80	62,80	65.350.000		APBD	DISDIKBUD
5	Kemampuan numerasi	Nilai	2022			28,35	28,35	-		APBD	DISDIKBUD			54,27	54,27	95.790.000		APBD	DISDIKBUD

6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022			0	0	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	250.357.000		APBD	DISDIKBUD
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022			0	0	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	125.540.000		APBD	DISDIKBUD
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022			64,60	64,60	301.186.833		APBD	DISDIKBUD			84,81	84,81	331.305.516		APBD	DISDIKBUD
9	Indeks iklim kebinekaan	%	2022			66,85	66,85	301.186.833		APBD	DISDIKBUD			78,77	78,77	331.305.516		APBD	DISDIKBUD
10	Indeks iklim inklusivitas	%	2022			54,80	54,80	301.186.833		APBD	DISDIKBUD			77,66	77,66	331.305.516		APBD	DISDIKBUD
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	2022			16,00	16,00	7.754.692.662		APBD	DISDIKBUD			66	66	8.530.161.928		APBD	DISDIKBUD
12	Indeks distribusi guru	%	2022			0,29	0,29	23.935.850		APBD	DISDIKBUD			50	50	26.329.435		APBD	DISDIKBUD
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	2022			92,25	92,25	89.352.750		APBD	DISDIKBUD			142	142	98.288.025		APBD	DISDIKBUD
14	Proporsi PTK penggerak	%	2022			0,03	0,03	28.364.250		APBD	DISDIKBUD			50	50	31.200.675		APBD	DISDIKBUD
15	Pengalaman pelatihan guru	%	2022			75,50	75,50	-		APBD	DISDIKBUD			126	126	45.500.000		APBD	DISDIKBUD
4)	Pendidikan Kesetaraan				964	964				APBD			964	964					
1	Angka partisipasi kasar	%	2022			0	0	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	152.500.000			DISDIKBUD
2	Angka partisipasi sekolah	%	2022			4,23	4,23	404.293.000		APBD	DISDIKBUD			100	100	444.722.300			DISDIKBUD
3	Angka partisipasi murni	%	2022			96,75	96,75	-		APBD	DISDIKBUD			145	145	250.780.000			DISDIKBUD
4	Kemampuan literasi	Nilai	2022			57,76	57,76	-		APBD	DISDIKBUD			62,80	62,80	55.450.000		APBD	DISDIKBUD
5	Kemampuan numerasi	Nilai	2022			52,29	52,29	-		APBD	DISDIKBUD			54,27	54,27	45.780.000		APBD	DISDIKBUD
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022			0	0	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	55.230.000			DISDIKBUD
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022			0	0	-		APBD	DISDIKBUD			-	-	235.760.000			DISDIKBUD
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022			78,73	78,73	-		APBD	DISDIKBUD			80,98	80,98	250.230.000			DISDIKBUD
9	Indeks iklim kebinekaan	%	2022			76,56	76,56	-		APBD	DISDIKBUD			78,77	78,77	135.540.000		APBD	DISDIKBUD
10	Indeks iklim inklusivitas	%	2022			74,56	74,56	-		APBD	DISDIKBUD			77,66	77,66	125.600.000		APBD	DISDIKBUD
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	2022			21	21	-		APBD	DISDIKBUD			31	31	85.730.000			DISDIKBUD
12	Indeks distribusi guru	%	2022			21	21	23.935.850		APBD	DISDIKBUD			31	31	26.329.435			DISDIKBUD
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	2022			0	0	-		APBD	DISDIKBUD			50	-	75.643.000		APBD	DISDIKBUD
14	Proporsi PTK penggerak	%	2022			0	0	28.364.250		APBD	DISDIKBUD			50	-	31.200.675		APBD	DISDIKBUD
15	Pengalaman pelatihan guru	%	2022			76	76	-		APBD	DISDIKBUD			81	81	250.700.000		APBD	DISDIKBUD

1	Angka partisipasi kasar	%	2022					167.750.000		DISDIKBUD				184.525.000		DISDIKBUD			202.977.500		DISDIKBUD		
2	Angka partisipasi sekolah	%	2022		100	100	489.194.530			DISDIKBUD		100	100	538.113.983		DISDIKBUD		100	100	591.925.381		DISDIKBUD	
3	Angka partisipasi murni	%	2022				275.858.000			DISDIKBUD				303.443.800		DISDIKBUD				333.788.180		DISDIKBUD	
4	Kemampuan literasi	%	2022		65,82	65,82	60.995.000		APBD	DISDIKBUD		68,84	68,84	67.094.500		APBD	DISDIKBUD		71,86	71,86	73.803.950		APBD
5	Kemampuan numerasi	Nilai	2022		56,26	56,26	50.358.000		APBD	DISDIKBUD		58,25	58,25	55.393.800		APBD	DISDIKBUD		60,24	60,24	60.933.180		APBD
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022				60.753.000			DISDIKBUD				66.828.300			DISDIKBUD				73.511.130		
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022				259.336.000			DISDIKBUD				285.269.600			DISDIKBUD				313.796.560		
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022				275.253.000			DISDIKBUD				302.778.300			DISDIKBUD				333.056.130		
9	Indeks iklim kebinekaan	%	2022		80,98	80,98	149.094.000		APBD	DISDIKBUD		83,19	83,19	164.003.400		APBD	DISDIKBUD		85,40	85,40	180.403.740		APBD
10	Indeks iklim inklusivitas	%	2022		80,76	80,76	138.160.000		APBD	DISDIKBUD		83,86	83,86	151.976.000		APBD	DISDIKBUD		86,96	86,96	167.173.600		APBD
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	2022		41	41	94.303.000			DISDIKBUD		51	51	103.733.300			DISDIKBUD		61	61	114.106.630		
12	Indeks distribusi guru	%	2022		41	41	28.962.379			DISDIKBUD		51	51	31.858.616			DISDIKBUD		61	61	35.044.478		
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	2022		0	0	83.207.300		APBD	DISDIKBUD		0	0	91.528.030		APBD	DISDIKBUD		0	0	100.680.833		APBD
14	Proporsi PTK penggerak	%	2022		0	0	34.320.743		APBD	DISDIKBUD		0	0	37.752.817		APBD	DISDIKBUD		0	0	41.528.098		APBD
15	Pengalaman pelatihan guru	%	2022		86	86	275.770.000		APBD	DISDIKBUD		91	91	303.347.000		APBD	DISDIKBUD		96	96	333.681.700		APBD

Kegiatan :

- Kolom 1 : Diisi Nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Program
- Kolom 3 : Diisi Kegiatan
- Kolom 4 : Diisi Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi Satuan
- Kolom 6 : Diisi Tahun Dasar
- Kolom 7 : Diisi Target
- Kolom 8 : Diisi Realisasi
- Kolom 9 : Diisi Anggaran
- Kolom 10 : Diisi Inisiasi
- Kolom 11 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 12 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 13 : Diisi Target
- Kolom 14 : Diisi Realisasi
- Kolom 15 : Diisi Anggaran
- Kolom 16 : Diisi Inisiasi
- Kolom 17 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 18 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 19 : Diisi Target
- Kolom 20 : Diisi Realisasi
- Kolom 21 : Diisi Anggaran
- Kolom 22 : Diisi Inisiasi
- Kolom 23 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 24 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 25 : Diisi Target
- Kolom 26 : Diisi Realisasi
- Kolom 27 : Diisi Anggaran
- Kolom 28 : Diisi Inisiasi
- Kolom 29 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 30 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 31 : Diisi Target
- Kolom 32 : Diisi Realisasi
- Kolom 33 : Diisi Anggaran
- Kolom 34 : Diisi Inisiasi
- Kolom 35 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 36 : Diisi Instansi Pelaksana

3.2.2 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil			5209	5209			3.219.897.125		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5738	5738				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	2022			521	521			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			574	574		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
2	Tablet tambah darah	Tablet	2022			468810	468810			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			516420	516420		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	2022			4	4			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			4	4		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
10	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
11	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			4688	4688			1.333.530.000		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5477	5744				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
1	Formulir Partograf	Formulir	2022			4688	4688			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5477	5477		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2022			5209	5209			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandunga	Orang	2022			4	4			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			4	4		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4611	4611			25.720.000		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5216	5216				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	2022			4611	4611			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5216	5216		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	2022			4611	4611			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5216	5216		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
3	Salap/tetes mata antibiotik	Orang	2022			4611	4611			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5216	5216		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	2022			4611	4611			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5216	5216		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	2022			4611	4611			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5216	5216		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2022			4611	4611			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5216	5216		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	2022			4	4		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			4	4		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2022			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			20	20		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			6.109	6.109			362.620.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	6.204	6.204		#####		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	2022			6.109	6.109		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			6.204	6.204		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	2022			6.109	6.109		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			6.204	6.204		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Alat tulis, Rekam Medis	Paket	2022			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	2022			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	2022			56	56		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			58	58		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2022			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			20	20		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
8	Obat Diabetes Melitus	Paket	2022			2605	2605		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2651	2651		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			565	565			242.470.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	574	574				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	2022			61	61		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			63	63		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.483	4.483			589.620.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	3.440	3.400		#####		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Reagen Zn TB	Paket	2022			4.483	4.483		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.440	3.400		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	paket	2022			4.483	4.483		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.440	3.400		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pendingin	Paket	2022			4.483	4.483		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.440	3.400		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Catridge tes cepat molekuler	Paket	2022			4.483	4.483		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.440	3.400		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokume	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokume	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	2022			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	2022			56	56		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			58	58		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2	Tensimeter	Unit	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokume	2022			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	2022			61	61		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			63	63		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2022			82	82		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Obat Hipertensi	Paket	2022			68013	68013		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			69200	69200		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		2022	2605	2605			25.720.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	2651	2651				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Alat : Glukometer	Unit	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	2022			2605	2605		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2651	2651		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Alat : Kapas Alkohol	Unit	2022			2605	2605		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2651	2651		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Alat : Lancet	Unit	2022			2605	2605		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2651	2651		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	2022			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	2022			61	61		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			63	63		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2022			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			88	88		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2022			82	82		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
10	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Unit	2022			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
11	Tenaga kesehatan : Dokter	Dokume	2022			61	61		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			63	63		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
14	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2022			87	87		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			88	88		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
15	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2022			82	82		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			23647				589.807.500	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	24881	24881				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	2022			23647	23647		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			24881	24881		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	2022			23647	23647		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			24881	24881		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Buku kesehatan lansia	Buku	2022			23647	23647		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			24881	24881		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	2022			61	61		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			63	63		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2022			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			88	88		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	2022			82	82		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	2022			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			68013	68013			1.404.130.715	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	69200	69200				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2	Buku pemantauan kesehatan	Buku	2022			40851	40851		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			43764	43764		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokume	2022			40851	40851		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			43764	43764		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokume	2022			40851	40851		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			43764	43764		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	2022			40851	40851		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			43764	43764		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	2022			19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2022			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			88	88		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	2022			82	82		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			84	84		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	2022			590	590		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	2022						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			190843	190843			25.720.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	199308	199308				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoma	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Alat ukur berat badan	Unit	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Alat : Tensimeter	Unit	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Alat : Glukometer	Unit	2022			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Alat : Tes strip gula darah	Unit	2022			190843	190843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			199308	199308		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Alat : Lancet	Unit	2022			190843	190843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			199308	199308		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Alat : Kapas alkohol	Unit	2022			190843	190843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			199308	199308		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Alat : KIT IVA Tes	Unit				81124	81124		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			99654	99654		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	2022			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4)	Pelayanan Kesehatan Balita			18641	18641			2.597.601.814	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	25057	25057				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Kuisisioner Pra Skining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokume	2022			18641	18641		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			25057	25057		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	2022			18641	18641		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			25057	25057		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2022			5209	5209		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5738	5738		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Vitamin A Biru	Kapsul	2022			18641	18641		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			25057	25057		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Vitamin A Merah	Kapsul	2022			18641	18641		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			25057	25057		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Vaksin imunisasi dasar HBO	Vaksin	2022			18641	18641		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			25057	25057		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Vaksin imunisasi dasar BCG	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Vaksin imunisasi dasar Polio	Orang	2022			3728	3728		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			5011	5011		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Vaksin imunisasi dasar IPV	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
10	Vaksin imunisasi dasar DPT -HB -Hib	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
11	Vaksin imunisasi dasar Campak	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12	Vaksin imunisasi dasar Rubella	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
13	Vaksin imunisasi lanjutan DPT -HB -Hib	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
14	Vaksin imunisasi lanjutan Campak	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
15	Vaksin imunisasi lanjutan Rubella	Vaksin	2022			1865	1865		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2506	2506		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	2022			18641	18641		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			25057	25057		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
17	Peralatan Anafilaktik	Paket	2022			19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
18	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	2022			61	61		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			63	63		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
19	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2022			572	572		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			582	582		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
20	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2022			916	916		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			926	926		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2022			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			88	88		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	2022			805	805		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			820	820		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	2022						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			40851	40851			855.290.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	43764	43764				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Buku raport kesehatanku	Buku	2022			40851	40851		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			43764	43764		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5878	5878				118	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5996	5996						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5878	5878				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
2	Tablet tambah darah			518670	518670		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		529043	529043				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		539624	539624					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
7	Kartu ibu/rekam medis ibu			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan			4	4		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		4	4				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		4	4					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
10	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
11	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5501	5501				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5611	5611					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5723	5723						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
1	Formulir Partograf			5501	5501		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5611	5611				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5723	5723					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
2	Kartu ibu (rekam medis)			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandunga			4	4		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		4	4				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		4	4					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
5	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
6	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5239	5239				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5344	5344					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	5451	5451						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
1	Vaksin Hepatitis B0			5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5344	5344				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5451	5451					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
2	Vitamin K1 injeksi			5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5344	5344				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5451	5451					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
3	Salep/tetes mata antibiotik			5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5344	5344				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5451	5451					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
4	Formulir bayi baru lahir			5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5344	5344				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5451	5451					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5344	5344				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5451	5451					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5344	5344				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5451	5451					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2	2				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2	2					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB
8	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
9	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	25178	25178				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB							
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku			25178	25178		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			25178	25178		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5763	5763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5996	5996		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
4	Vitamin A Biru			25178	25178		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
5	Vitamin A Merah			25178	25178		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO			25178	25178		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio			5036	5036		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5136	5136		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		5239	5239		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella			2518	2518		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2568	2568		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2620	2620		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			25178	25178		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		25682	25682		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		26195	26195		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
17	Peralatan Anafilaktik			19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
18	Tenaga kesehatan : Dokter			66	66		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		69	69		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		72	72		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
19	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
20	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		94	94		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan			840	840		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		860	860		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		880	880		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	43885	43885				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	44763	44763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	45658	45658		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB							
1	Buku raport kesehatanku			43885	43885		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		44763	44763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		45658	45658		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
2	Buku pemantauan kesehatan			43885	43885		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		44763	44763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		45658	45658		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
3	Kuesioner skrining kesehatan			43885	43885		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		44763	44763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		45658	45658		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah			43885	43885		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		44763	44763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		45658	45658		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah			43885	43885		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		44763	44763		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		45658	45658		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi			19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		19	19		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
8	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
9	Tenaga kesehatan : Ahil Gizi			90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		94	94		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
12	Tenaga Non kesehatan : Guru						DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	202708	202708				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	212843	212843			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	223486	212843			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
2	Alat ukur berat badan			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
3	Alat : Alat ukur lingkar perut			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
4	Alat : Tensimeter			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
5	Alat : Glukometer			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6	Alat : Tes strip gula darah			202708	202708		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		212843	212843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		223486	212843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Alat : Lancet			202708	202708		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		212843	212843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		223486	212843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
8	Alat : Kapas alkohol			202708	202708		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		212843	212843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		223486	212843		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
9	Alat : KIT IVA Tes			101354	101354		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		106422	106422		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		111743	106422		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
10	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
11	Tenaga kesehatan : Dokter			66	66		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		69	69		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		72	72		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
12	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			602	602			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			607	607			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
13	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			946	946			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			953	953			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
14	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			92	92			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			94	94			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
15	Tenaga Kesehatan Masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			90	90			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			92	92			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	26150	26150				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	26935	26935					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	27743	27743					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol			26150	26150		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			26935	26935			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			27743	27743			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			26150	26150		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			26935	26935			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			27743	27743			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
3	Buku kesehatan lansia			26150	26150		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			26935	26935			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			27743	27743			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
4	Tenaga kesehatan : Dokter			66	66		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			69	69			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			72	72			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
5	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			602	602			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			607	607			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
6	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			946	946			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			953	953			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			92	92			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			94	94			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			90	90			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			92	92			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70380	70380				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	73899	73899					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	77594	73899					DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
2	Tensimeter			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	
4	Tenaga kesehatan : Dokter			66	66		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			69	69			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			72	72			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
5	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Obat Hipertensi			70380	70380		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		73899	73899		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		77594	73899		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2696	2696				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	2831	2831		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	2972	2972		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB							
1	Alat : Glukometer			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
2	Alat : Strip Tes Gula Darah			2696	2696		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2831	2831		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2972	2972		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
3	Alat : Kaps Alkohol			2696	2696		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2831	2831		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2972	2972		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
4	Alat : Lancet			2696	2696		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2831	2831		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2972	2972		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Tenaga kesehatan : Dokter			66	66		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		69	69		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		71	71		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
8	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
5	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
6	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		94	94		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		90	90		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
8	Obat Diabetes Melitus			2696	2696		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2831	2831		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2972	2972		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	582	582				DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	611	611		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	642	642		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB							
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			1	1			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Tenaga kesehatan : Dokter			66	66		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		69	69			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			72	72			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.560	3.560			790.000.000	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	3.735	3.735	3.735	810.000.000		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	3.772	3.772			810.000.000		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
2	Reagen Zn TB			3.560	3.560		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		3.735	3.735			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.772	3.772			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95			3.560	3.560		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		3.735	3.735			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.772	3.772			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emers), Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi). Rak pengering			3.560	3.560		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		3.735	3.735			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.772	3.772			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
5	Catridge tes cepat molekuler			3.560	3.560		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		3.735	3.735			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			3.772	3.772			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)			17	17		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			17	17			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			2	2		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		2	2			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			2	2			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
9	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			953	953			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			60	60		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		62	62			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			64	64			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen			6	6		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		6	6			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			6	6			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12	Tenaga kesehatan masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		90	90			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			92	92			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu			20	20		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		20	20			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			20	20			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.330	6.330			#####	DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	6.405	6.405		#####		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB	6.469	6.469			#####		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)			34	34		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			34	34			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama			6.330	6.330		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		6.405	6.405			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		6.469	6.469			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
3	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			6.330	6.330		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		6.405	6.405			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		6.469	6.469			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
4	Alat tulis, Rekam Medis			1	1		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		1	1			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			3	3		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		3	3			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		3	3			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
6	Tenaga kesehatan : Perawat			936	936		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		946	946			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		953	953			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
7	Tenaga kesehatan : Bidan			592	592		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		602	602			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		607	607			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			60	60		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		62	62			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		64	64			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
9	Tenaga kesehatan masyarakat			86	86		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		90	90			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		92	92			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu			20	20		DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		20	20			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB		20	20			DAU / DAK / BOK Puskesmas	Dinkes PPKB			

3.2.3 Rencana Aksi Daerah penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11
1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2023	49.583	49.583	475	475	15.420.876.495	APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2023						APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	2023						APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	2023	49.583	49.583	727	727	178.858.000	APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	2023						APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	2023	37.182	37.182	964	964	7.199.022.000	APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	2023			5	-		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	2023			10	-		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	2023			4	-		APBD (DAK/DAU)	DPUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	49.583	49.583	750	750	17.734.007.969		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)					-		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)					-		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	49.583	49.583	50	50	205.686.700		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)							APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	37.182	37.182	250	250	8.278.875.300		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			5	5			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			10	10			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			4	4			APBD (DAK/DAU)	DPUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27
1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	49.583	49.583	750	750	20.394.109.165		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)							APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)							APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	49.583	49.583	50	50	236.539.705		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)							APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	37.182	37.182	250	250	9.520.706.595		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			5	5			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			10	10			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			4	4			APBD (DAK/DAU)	DPUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	28	29	30	31	32	33	34	35
1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	475	475			23.453.225.539		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	400	-					APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	200	-					APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	727	727			272.020.661		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1	-					APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	250	964			10.948.812.584		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			5	5			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			10	10			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			4	4			APBD (DAK/DAU)	DPUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43
1)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	475	-			26.971.209.370		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	400	-					APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	200	-					APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	727	-			312.823.760		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1	-					APBD (DAK/DAU)	DPUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	250	-			12.591.134.472		APBD (DAK/DAU)	DPUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			5	5			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			10	10			APBD (DAK/DAU)	DPUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			4	4			APBD (DAK/DAU)	DPUPR

3.2.4 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2022								
1	Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	2022	1	1	1	1	Rp 6.490.600	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2022	1	1	1	1	Rp 33.571.025	DPRPPLH	APBD	APBD
2)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	2022						DPRPPLH	APBD	APBD
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Dokumen	2022	1	1	1	1	Rp 73.299.150	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Dokumen	2022	-	-	-	-	Rp -	DPRPPLH	APBD	APBD
3	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	2022	-	-	-	-	Rp -	DPRPPLH	APBD	APBD
4	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Dokumen	2022					Rp -	DPRPPLH	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1)	Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	4	4	4	25.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	1	1	1	1	25.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1		DPRPPLH	APBD	APBD
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	4	4	4	4	47.653.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	1	1	1	1	142.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
3	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	50.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
4	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	1	1	1	1	100.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27
1)	Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1	Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota	4	4	4	4	25.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	1	1	1	1	25.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						DPRPPLH	APBD	APBD
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	2	2	2	2	50.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	4	4	4	4	150.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
3	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	60.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
4	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	1	1	1	1	100.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	28	29	30	31	32	33	34	35
1)	Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1	Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota	4	4	4	4	25.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	1	1	1	1	30.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						DPRPPLH	APBD	APBD
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	2	2	2	2	60.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	4	4	4	4	160.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
3	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	60.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
4	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	1	1	1	1	100.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43
1)	Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1	Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota	4	4	4	4	25.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	1	1	1	1	30.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						DPRPPLH	APBD	APBD
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	1	1	1	60.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	5	5	5	5	170.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
3	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	2	2	2	70.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD
4	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	2	2	2	2	100.000.000	DPRPPLH	APBD	APBD

3.2.5 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)										
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	2022	60	36	36	36	Rp -	SAT POL PP	APBD	APBD
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	2022	6	3	3	3	Rp -	SAT POL PP	APBD	APBD
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Pelindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	2022	663	30	30	30	Rp 37.310.750	SAT POL PP	APBD	APBD
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2022	1	1	1	1	Rp -	SAT POL PP	APBD	APBD
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	2022	8	8	8	8	Rp -	SAT POL PP	APBD	APBD
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	2022	1	1	1	1	Rp -	SAT POL PP	APBD	APBD
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)							Rp 3.800.000			
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	2022	1	1	1	1	Rp -	BPBD	APBD	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	2022	267.569	42.313	42.313	42.313	Rp -	BPBD	APBD	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	2022	267.569	117.584	117.584	117.584	Rp -	BPBD	APBD	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	2022	65	64	64	64	Rp 20.157.600	BPBD	APBD	APBD
5	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	2022	58	48	48	48	Rp -	BPBD	APBD	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)										
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Orang	2022	65	10	10	10	Rp -	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Posko	2022	12	4	4	4	Rp -	BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN))										
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Orang	2022	5.000	7.789	7.789	7.789	Rp -	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Dokumen	2022	1	1	1	1	Rp 31.355.800	BPBD	APBD	APBD
3	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Layanan	2022	12	12	12	12	Rp 23.855.000	BPBD	APBD	APBD
4	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Layanan	2022	50	3	3	3	-	BPBD	APBD	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	2022	18	10	10	10	7.199.022.000	BPBD	APBD	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)										
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Dokumen	2022	1	1	1	1	-	BPBD	APBD	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Unit	2022	44	18	18	18	-	BPBD	APBD	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Orang	2022	26	9	9	9	-	BPBD	APBD	APBD
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Layanan	2022	18	-	-	-	-	BPBD	APBD	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	2022	18	-	-	-	-	BPBD	APBD	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Rumah Tangga	2022	4	-	-	-	-	BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)								
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	60	40	40	40	45.000.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	4	4	4	76.500.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	663	35	35	35	47.310.750	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	1	1	22.442.600	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	8	8	8	8	150.000.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena <u>cedera fisik sedang dan/atau berat</u>)	2	2	2	2	50.000.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					35.000.000			
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	1	1	73.625.000	BPBD	APBD	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	284.135	46.544	46.544	46.544	15.000.000	BPBD	APBD	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	284.135	129.342	129.342	129.342	15.000.000	BPBD	APBD	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	65	65	65	65	150.000.000	BPBD	APBD	APBD
5	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	58	53	53	53	26.270.000	BPBD	APBD	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	65	11	11	11	38.372.600	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	12	6	6	6	32.867.000	BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2024				Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN))								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000.000	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1	1	1	1	72.867.000	BPBD	APBD	APBD
3	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	12	12	12	75.000.000	BPBD	APBD	APBD
4	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	50	6	6	6		BPBD	APBD	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	20	11	11	11	8.278.875.300	BPBD	APBD	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)								
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	1	1		BPBD	APBD	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	50	21	21	21		BPBD	APBD	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	26	10	10	10		BPBD	APBD	APBD
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	20	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	20	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4	3	3	3		BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Anggaran
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	5000	5.000	5000	5000	55.000.000	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1	1	1	1	80.153.700	BPBD	APBD	APBD
3	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	13	13	13	82.500.000	BPBD	APBD	APBD
4	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	50	7	7	7		BPBD	APBD	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	18	12	12	12	9.520.706.595	BPBD	APBD	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)								
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	1	1		BPBD	APBD	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	44	23	23	23		BPBD	APBD	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	26	11	10	10		BPBD	APBD	APBD
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	18	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	18	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4	4	3	3		BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)								
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	60	40	40	40	49.500.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	4	4	4	84.150.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	663	35	35	35	52.041.825	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	1	1	24.686.860	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	8	8	8	8	165.000.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	3	3	3	3	55.000.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					35.000.000			
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	1	1	80.987.500	BPBD	APBD	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	300.701	51.198	51.198	51.198	16.500.000	BPBD	APBD	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	300.701	133.276	133.276	133.276	16.500.000	BPBD	APBD	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	65	65	65	65	165.000.000	BPBD	APBD	APBD
5	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	58	58	53	53	28.897.000	BPBD	APBD	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	65	12	12	12	42.209.860	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	12	7	7	7	36.153.700	BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2026				Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	5000	9.494	9.494	9.494	60.500.000	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparat yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1	1	1	1	88.169.070	BPBD	APBD	APBD
3	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	14	14	14	90.750.000	BPBD	APBD	APBD
4	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	50	8	8	8		BPBD	APBD	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	18	13	13	13	10.948.812.584	BPBD	APBD	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)								
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	1	1		BPBD	APBD	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	44	25	25	25		BPBD	APBD	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	26	12	12	12		BPBD	APBD	APBD
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	18	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	18	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4	3	3	3		BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	28	29	30	31	32	33	34	35
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)								
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	60	40	40	40	49.500.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	4	4	4	84.150.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	663	35	35	35	52.041.825	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	1	1	27.155.546	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	8	8	8	8	181.500.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	4	4	4	4	55.000.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					42.000.000			
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	1	1	89.086.250	BPBD	APBD	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	317.267	56.318	56.318	56.318	18.150.000	BPBD	APBD	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	317.267	146.604	146.604	146.604	18.150.000	BPBD	APBD	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	65	65	65	65	181.500.000	BPBD	APBD	APBD
5	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	58	73	68	68	31.786.700	BPBD	APBD	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	65	13	12	12	46.430.846	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	12	8	8	8	39.769.070	BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)								
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	60	40	40	40	54.450.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	4	4	4	100.980.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	663	35	35	35	62.450.191	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	1	1	29.871.101	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	8	8	8	8	199.650.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	4	4	4	4	78.650.000	SAT POL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					42.350.000			
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	1	1	97.994.875	BPBD	APBD	APBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	333.833	61.950	61.950	61.950	19.965.000	BPBD	APBD	APBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	333.833	161.164	161.164	161.164	19.965.000	BPBD	APBD	APBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	65	65	65	65	199.650.000	BPBD	APBD	APBD
5	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	58	81	81	81	34.965.370	BPBD	APBD	APBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	65	14	14	14	51.073.931	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	12	9	9	9	43.745.977	BPBD	APBD	APBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2027				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Anggaran
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	5.000	5.000	5000	5000	66.550.000	BPBD	APBD	APBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1	1	1	1	96.985.977	BPBD	APBD	APBD
3	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	15	15	15	99.825.000	BPBD	APBD	APBD
4	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	50	9	9	9		BPBD	APBD	APBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	18	14	14	14	12.591.134.472	BPBD	APBD	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)								
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	1	1		BPBD	APBD	APBD
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	44	28	25	25		BPBD	APBD	APBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	26	13	12	12		BPBD	APBD	APBD
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	18	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	18	3	3	3		BPBD	APBD	APBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4	4	4	4		BPBD	APBD	APBD

3.2.6. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti										
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	2022	367	367	367	367	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	Orang	2022	55	55	55	55	-	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	4	3	3	3	16.740.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	2	1	1	1	22.491.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	50	0	0	0	8.566.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti										
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	2022	5	2	2	2	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	5	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	Orang	2022	1	1	1	1	9.534.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2022	1	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	2022	5	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2022	4	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	4	2	2	2	-	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti										
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	2022	444	444	444	444	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	50	42	42	42	19.354.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	Orang	2022	5	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2022	5	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	5	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti										
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	1	1	1	1	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	Orang	2022	5	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2022	1	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2022	1	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2022	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	1	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	1	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	Orang	2022	1	1	1	1	6.974.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
1	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	4804	4804	4804	4804	41.889.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan sandang	Orang	2022	110	110	110	110	13.800.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2022	2	2	2	2	11.180.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2022	32	32	32	32	136.923.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2022	812	812	812	812	-	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	367	367	367	367	1.331.400	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	50	50	50	50	19.762.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	5	5	5	5	64.931.400	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	2	2	2	153.406.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	55	55	55	55	316.200.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	2	2	16.954.800	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	50	50	50	50	13.470.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	0	0	0	0	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0	0	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	0	0	0	0	0	DSP3A	APBD	DSP3A
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	100	100	100	100	27.020.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	100	100	100	100	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	6	6	6	6	5.200.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	5	5	5	5	1.412.800	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2024				Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	2	2	10.101.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0	-	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	5	5	5	5	28.419.500	DSP3A	APBD	DSP3A
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
1	Penyediaan permakanan	100	100	100	100	124.730.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan sandang	100	100	100	100	49.100.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	1	1	50.150.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50	50	50	50	48.750.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pelayanan dukungan Psikososial	100	100	100	100	1.800.000	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025				Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	500	500	500	500	20.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	50	50	50	50	30.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	25	25	25	25	50.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	100	100	100	100	200.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	20	20	20	20	120.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	10	10	10	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	5	5	200.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	60	60	60	60	400.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	2	2	17.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	100	100	100	100	30.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	100	100	100	100	25.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2	2	2	2	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	2	2	2	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1	7.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	1	1	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
1	Penyediaan permakanaan	100	100	100	100	175.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan sandang	100	100	100	100	100.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	1	1	150.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	100	100	100	100.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pelayanan dukungan Psikososial	100	100	100	100	50.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	2	28	29	30	31		33	34	35
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Pant								
1	Layanan data dan pengaduan	600	600	600	600	30.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	60	60	60	60	45.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	30	30	30	30	60.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	120	120	120	120	240.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	30	30	30	30	150.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	10	10	10	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	5	5	200.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	70	70	70	70	500.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	2	2	17.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pant								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pant								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	200	200	200	200	40.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	200	200	200	200	50.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2	2	2	2	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	2	2	2	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1	7.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	1	1	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
1	Penyediaan permakanan	150	150	150	150	200.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan sandang	150	150	150	150	150.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	1	1	150.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	150	150	150	150	150.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pelayanan dukungan Psikososial	150	150	150	150	75.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	700	700	700	700	40.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	75	75	75	75	55.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	50	50	50	50	100.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	150	150	150	150	300.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	40	40	40	40	200.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	10	10	10	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	5	5	200.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	75	75	75	75	600.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	2	2	17.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanaan	250	250	250	250	50.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	300	300	300	300	60.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan alat bantu	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	5	5	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	2	2	2	2	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2	2	2	2	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	2	2	2	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2027				Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
13	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti								
1	Layanan data dan pengaduan	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan permakanan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penyediaan sandang	1	1	1	1	5.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1	7.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	1	1	2.500.000	DSP3A	APBD	DSP3A
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	1	1	15.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
12	Layanan rujukan	1	1	1	1	10.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
1	Penyediaan permakanan	200	200	200	200	300.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
2	Penyediaan sandang	200	200	200	200	250.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	1	1	170.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	150	150	150	150	150.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A
5	Pelayanan dukungan Psikososial	150	150	150	150	75.000.000	DSP3A	APBD	DSP3A

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai kepenjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub system perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang di mulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang di jadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkan kannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, di operasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun di sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indicator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indicator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan public atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indicator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indicator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indicator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indicator

pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhakdi peroleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap semester.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indicator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensiaktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baikakan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukanguna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapaiter hadap *output*. Evaluasi biasa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasiter hadap pencapaian SPM di Kabupaten Bengkayang, maka indicator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapaiatau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, makadapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik darisisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

(a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

- (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan table dasar yang ada dalam Rencana Aksise bagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi di buat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Analisis capaian SPM mengacu pada materiutama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis tersebut, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;

- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program dan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program telah tercapai dan tepat sasaran atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih rendah yang diakibatkan rendahnya penganggaran penerapan SPM Daerah sehingga pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat masih belum maksimal. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemeruan SPM, yang memuat program, kegiatan dan su kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran di daerah selama 5 Tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Prioritas pemenuhan SPM yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021 bahwa sasaran pemenuhan SPM diterapkan berdasarkan pemenuhan yang ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga perlu sosialisasi Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di daerah, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bengkayang.
2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Kabupaten Bengkayang yang berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bengkayang secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran
4. Perlu bimbingan kepada Tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulan yang dilaporkan ke dalam aplikasi E-SPM yaitu : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS